

BAB 2

PERKEMBANGAN MEDIA MASSA INDONESIA DAN PEREMPUAN DALAM RANAH PERS INDONESIA

Dinamika perkembangan media massa di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa penjajahan Belanda dan Inggris, ketika media mulai digunakan sebagai sarana komunikasi, propaganda, sekaligus perlawanan, kemudian berlanjut pada masa pasca kemerdekaan yang menjadikan pers sebagai instrumen pembangunan dan demokratisasi. Pada periode Orde Baru, media menghadapi pembatasan ketat melalui regulasi dan kontrol pemerintah, sebelum akhirnya mengalami transformasi besar pada era digitalisasi dengan hadirnya internet dan media kontemporer yang mengubah pola konsumsi informasi masyarakat serta memperluas jumlah media dan konsumen. Selain perkembangan historis tersebut, pembahasan juga menyoroti peran perempuan dalam ranah pers Indonesia, baik kontribusinya dalam perkembangan pers nasional maupun realitas perjalanan karier sebagai jurnalis perempuan yang kerap dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural.

2.1. Dinamika Perkembangan Media Massa Indonesia

2.1.1. Masa Penjajahan Belanda dan Inggris

Bibit perkembangan pers di Indonesia berasal dari surat kabar tulisan tangan yang terbit pada tahun 1615, yakni *Memoria der Nouvelles*. Pada masa itu, Indonesia masih belum memiliki mesin cetak sehingga pembuatan surat kabar dilakukan secara manual dengan metode tulisan tangan. Seperti halnya fase awal penerbitan surat kabar di Eropa yang belum menjamah sistem cetak. Meskipun telah tercipta, mesin cetak

menjadi teknologi eksklusif yang hanya dikuasai oleh para raja (*authoritarian concept*) di Eropa pada tahun 1440–1609 (Nurudin, 2009).

Surat kabar *Memoria der Nouvelles* tidak hanya dibaca oleh pribumi, tetapi juga oleh orang-orang Belanda. Mulai pada tahun 1644, surat kabar tersebut menjadi media yang menyampaikan berita-berita dari tanah Belanda maupun kepulauan lainnya. Bahkan salah seorang pejabat dari Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), yaitu Jan Pieterzon Coen pun kerap membacanya. Eksistensi surat kabar inilah yang mendorong VOC menerbitkan surat kabar sendiri yang bernama *MdN*. Media itu dibuat untuk mencapai tujuan VOC di Indonesia, dengan isi koran yang tentunya telah dimonopoli dan disensor oleh pihak VOC (Nurudin, 2009).

Jan Erman Jordens merintis *Bataviasche Nouvelles en Politiqua Raionnementen* (disingkat *Bataviasche Nouvelles*) yang mulai terbit pada tanggal 7 Agustus 1744. Surat Kabar ini memuat segala informasi mengenai tugas dan peran militer Belanda serta sejarah agama Kristen di Indonesia. Sayangnya surat kabar ini dibubarkan setelah dua tahun beroperasi, tepatnya pada tanggal 20 Juni 1746.

Pada tanggal 5 Januari 1810, hadir sebuah surat kabar baru yang berfokus untuk memublikasi seluruh kegiatan pemerintah beserta jajaran pegawainya. Ini bertujuan agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk membahas segala permasalahan yang

menyangkut penjajah. Surat kabar ini berhenti terbit setelah Hindia-Belanda jatuh ke tangan Inggris. Namun, sewaktu pemerintah Inggris harus menyerahkan kekuasaan kembali kepada pemerintah Belanda, koran tersebut bangkit kembali pada tahun 1816 dengan nama baru, yaitu *Batavia Courant*. Silih berganti waktu, surat kabar ini pun mengalami banyak perubahan. Seperti pada tahun 1827 yang melakukan perubahan nama menjadi *Javasche Courant* dan terus terbit sampai Belanda hengkang dari Indonesia karena Jepang mulai memasuki Indonesia pada tahun 1942. Oleh penjajah Jepang, penerbitannya dilanjutkan dengan nama *Ken Po* atau yang berarti “berita pemerintah” (Nurudin, 2009).

Semasa pendudukan Inggris di Indonesia, pemerintah kolonial sempat menerbitkan *Java Government Gazette*, sebuah surat kabar mingguan resmi berbahasa Inggris yang pertama kali terbit pada 29 Februari 1812 di Batavia. Surat kabar ini menyajikan berbagai informasi resmi sebagai media perpanjangan pemerintah kolonial Inggris (Nurudin, 2009). Dikelola di bawah pemerintahan Thomas Stamford Raffles, *Java Government Gazette* memainkan peran penting sebagai arsip tertulis periode transisi Inggris di Jawa, sekaligus sumber informasi untuk memahami orientasi politik dan birokrasi kolonial (Supratman, 2024).

Tonggak awal munculnya pers swasta di Indonesia ditandai oleh surat kabar swasta pertama yang terbit di Surabaya pada tahun 1835,

yaitu *Soerabajaasch Advertentieblad*. Surat kabar ini dikelola oleh C.F. Smith sebagai media advertensi yang menyajikan pengumuman dagang dan iklan. Koran ini berganti nama menjadi *Soerabajaasch Nieuws en Advertentieblad* pada tahun 1953 karena telah memperluas cakupan publikasinya hingga ke luar negeri (Nurudin, 2009).

Melihat akibat dari kekuasaan kolonial Belanda saat itu, media di Indonesia pun didominasi dengan bahasa Belanda. Akan tetapi, pers di Indonesia kian berkembang hingga lahir sebuah media bernama *Bromartani*, surat kabar penduduk asli pertama yang menggunakan bahasa Jawa krama inggil dan Melayu. Surat kabar mingguan ini debut di Surakarta pada 29 Maret 1855 di bawah naungan Hartevelde & Co. (Nurudin, 2009).

Pers Nasional semakin merebak dengan mulai hadirnya percetakan. Seperti percetakan yang dirintis oleh R.M. Tirtohadisoerjo pada tahun 1904. Tiga tahun setelah percetakan tersebut berdiri, ia mulai menerbitkan surat kabar mingguan yang bernama *Medan Prijaji* (Nurudin, 2009). Kemudian, beranjak menjadi surat kabar harian pada tahun 1910. R.M. Tirtohadisoerjo atau yang memiliki nama asli Djokomono, disebut oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai “pelopor dalam bidang jurnalistik”, sebab ia pula yang meletakkan dasar jurnalistik modern di Indonesia, baik dalam cara memusatkan karangan, pemberitaan, berbagai iklan, dan lain sebagainya (Serikat Penerbit Surat kabar, 1971)

Ki Hadjar Dewantara atau yang memiliki nama asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, menjadi salah satu tokoh pejuang nasional yang ikut andil dalam perkembangan media massa kala itu. Ki Hajar Dewantara, Ernest Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi), dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, tiga tokoh besar yang kemudian dikenal sebagai “Tiga Serangkai” ini memprakarsai terbentuknya sebuah organisasi politik bernama *Indische Partij* (IP) pada 25 Desember 1912. Untuk menyebarkan gagasan politik yang kritis, para pendirinya memanfaatkan pers sebagai sarana utama. Terdapat dua media yang lahir dari perjuangan tersebut, yakni majalah harian *Het Tijdschrift* dan surat kabar *De Express*. Namun, Bubarnya *Indische Partij* bukanlah akhir, tetapi justru menjadi pemicu tumbuhnya pelbagai surat kabar independen yang dilandaskan pada keinginan dan tujuan kemerdekaan bangsa, seperti harian *Pertimbangan*, mingguan *Goentoer*, mingguan *Pajajaran*, mingguan *Sapoedjagat*, dan mingguan *Panggoegah*.

Media di Indonesia selalu mengalami perkembangan secara berkala. Bahkan menjelang masa Perang Dunia II, Indonesia memiliki 350 hingga 400 surat kabar harian dan majalah (mingguan dan bulanan). Sebagai respons terhadap semakin kuatnya pengaruh pers, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan sebuah peraturan represif yang dikenal sebagai *Persbreidel Ordonantie*. Instrumen hukum yang dikukuhkan pada tanggal 7 September 1931 ini memberikan kewenangan kepada Gubernur Jenderal untuk melarang penerbitan tertentu apabila dapat

“mengganggu ketertiban umum”. Pergerakan media pers nasional untuk mengkritisi pemerintah secara signifikan dikekang kebebasannya dengan membatasi gerak hingga penutupan media secara sepihak. Tidak hanya sampai di situ, pemerintah kolonial Belanda juga memberlakukan *Haatzaai Artikelen* atau “Pasal Penyebar Kebencian”. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah akan mengancam siapa saja yang dianggap menyebarkan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Belanda atau Hindia-Belanda, maupun terhadap kelompok penduduk tertentu di Hindia-Belanda (Nurudin, 2009)

2.1.2. Pasca Kemerdekaan

Seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, media massa Indonesia memasuki fase baru yang sangat strategis. Salah satu tonggak penting adalah berdirinya Radio Republik Indonesia (RRI) pada 11 September 1945, hasil rapat perwakilan radio-radio eks Jepang (Hoso Kyoku) yang kemudian dipimpin oleh dr. Abdulrahman Saleh. Sejak awal berdirinya, RRI difungsikan sebagai instrumen komunikasi pemerintah, menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok negeri, serta menjadi alat diplomasi dalam menunjukkan eksistensi Indonesia di mata dunia (Komisi Penyiaran Indonesia., 2018; Museum Pendidikan Nasional UPI, 2023; Perhimpunan Dokter Indonesia, 2024).

Pada periode Demokrasi Liberal (1945–1959), media cetak tumbuh dalam iklim kebebasan relatif dan banyak dimanfaatkan sebagai corong partai politik. Kondisi ini mencerminkan teori development press di

mana media berfungsi sebagai agen pembangunan sekaligus ruang kontestasi politik. Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), pers mulai kehilangan kebebasannya. Setiawan (2019) menegaskan bahwa pada periode ini, media lebih diarahkan sebagai alat propaganda politik pemerintah sehingga fungsi kontrol sosial melemah (Syam, 2006).

Perkembangan media pasca kemerdekaan menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan konfigurasi politik nasional dari semangat menyuarakan kemerdekaan dan persatuan melalui RRI, berubah menjadi alat partai politik di era Demokrasi Liberal, hingga menghadapi represi pada masa Demokrasi Terpimpin.

2.1.3. Orde Baru

Pada masa Orde Baru, kebebasan pers semakin terbatas melalui berbagai mekanisme kontrol Negara. Dominasi rezim terhadap media diwujudkan melalui infrastruktur hukum, antara lain UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers dan ketetapan TAP MPRS No. XXXII/MPRS/1966, yang meskipun memberi landasan hukum awal, justru membuka ruang bagi sistem perizinan represif melalui SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) dan SIT (Surat Izin Terbit). Berdasarkan penelitian, sistem ini menjadi alat pengendalian yang efektif untuk membredel media yang dianggap tidak pro-pemerintah (Imron & Sariyatun, 2016).

Puncak asesifitas rezim membuat banyak media dipaksa tutup, seperti setelah peristiwa Malari 1974 di mana sejumlah surat kabar dibredel karena dianggap mendukung gerakan mahasiswa—dalam arti melanggar stabilitas nasional Orde Baru. Selanjutnya, kontrol semakin diperketat melalui SIUPP dan regulasi lainnya, menjadikan praktik pembredelan, meski tidak selalu disebut demikian, sebagai bagian dari kebijakan pemerintah (Imron & Sariyatun, 2016).

Tak hanya pers arus utama yang menjadi sasaran, pers alternatif—seperti mahasiswa atau terbitan kecil—juga tidak luput dari pengawasan. Dalam studi di Jurnal Komunika, dijelaskan bahwa pers alternatif harus tunduk pada sistem Surat Tanda Terdaftar (STT). Jika melanggar, penerbitnya berisiko dicabut izinnya dan “dibredel” secara efektif (Eddyono, 2021).

Rezim Orde Baru berhasil membentuk sistem pers yang sangat terstruktur dan dikontrol ketat. Media tidak bisa berfungsi sebagai watchdog, melainkan lebih sering menjadi alat propaganda. Sebaliknya, bentuk perlawanan muncul dalam bentuk pers alternatif yang terus berusaha bertahan di sela-sela kontrol ketat pemerintahan.

2.1.4. Era Digitalisasi

Era digitalisasi membawa perubahan fundamental dalam ekosistem media massa Indonesia. Transformasi ini ditandai dengan pergeseran dari media konvensional menuju platform digital yang lebih cepat, interaktif, dan bersifat dua arah. Media massa kini tidak hanya

menyajikan berita dalam bentuk cetak atau siaran, tetapi juga memanfaatkan internet, media sosial, serta perangkat mobile untuk menjangkau audiens secara lebih luas dan instan.

Peluang besar di era digital juga menghadirkan tantangan serius, terutama menyangkut maraknya disinformasi. Studi Thomas dkk. (2021) menunjukkan bahwa literasi media daring memiliki peran penting dalam mengurangi kecenderungan masyarakat Indonesia mempercayai berita palsu, terutama di kalangan pengguna media sosial aktif. Hal ini menegaskan bahwa literasi digital menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas ekosistem informasi di era digital.

Pemerintah Indonesia juga merespons perkembangan digital dengan regulasi baru pada tahun 2024 yang mewajibkan platform global seperti Google dan Meta memberikan kompensasi kepada media lokal atas penggunaan konten jurnalistik. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung keberlangsungan media nasional di tengah dominasi perusahaan teknologi global (Reuters, 2024).

Dengan demikian, era digitalisasi mencerminkan perubahan besar dalam lanskap media Indonesia. Media yang mampu beradaptasi dengan teknologi digital sekaligus menjaga kredibilitas dan kualitas informasi akan tetap relevan dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan komunikasi kontemporer.

2.2. Perempuan pada Ranah Pers Indonesia

2.2.1. Peran Perempuan dalam Perkembangan Pers

Kemajuan pers di Indonesia tidak luput dari peran-peran penting perempuan. Untuk menyampaikan suara dan memperjuangkan emansipasi, perempuan menjalankan media inklusif yang diperuntukkan khusus bagi kaumnya. Satu di antaranya adalah *Poetri Hindia*, surat kabar mingguan yang menjadi titik perkembangan generasi awal para jurnalis perempuan pribumi. Sama seperti *Medan Prijaji*, Raden Mas Tirtoadhisoejo lah yang menjadi pendiri *Poetri Hindia*. Bersama dengan rekannya yang bernama R.T.A. Tirtokoesoemo, Ia berhasil menerbitkan media tersebut pada tanggal 1 Juli 1908 di Batavia.

Poetri Hindia sebagian besar dijalankan oleh para perempuan bangsawan dan istri dari pejabat pemerintahan yang hampir semuanya mengenyam pendidikan Belanda. Beberapa nama di antaranya seperti Raden Ayu Siti Habibah, istri pertama Raden Mas Tirtoadhisoejo; Raden Ayu Hendraningrat, istri dari Hendraningrat yang merupakan seorang asisten Wedana Teluknaga; Raden Ayu Tjokroadikoesoemo, menantu bupati Cianjur; Raden Fatimah, putri Wedana Bogor; Raden Ayu Mengkoedimedjo, keponakan Sultan Yogyakarta; S.N. Norhar Salim, putri Sultan Moh. Salim sekaligus guru di Fort de Kock, Bukittinggi; dan masih banyak lagi. Melalui peran mereka, surat kabar

ini bisa mengangkat ihwal dan isu perempuan secara luas di wilayah Hindia.

Surat kabar itu laku di kalangan menengah ke atas dan distribusinya kian meluas. Kesuksesan *Poetri Hindia* membawa nama dan tulisan mereka sampai dimuat ke *Nieuw Courant*, surat kabar asal Gravenhage, Belanda. Bahkan mendapat suntikan dana dari seorang Ratu Belanda, Sri Ratu Wilhelmina. Namun, masa kejayaan tersebut tidak bertahan lama. Pada akhirnya media surat kabar Poetri Hindia harus gulung tikar pada tahun 1912.

Kiprah perempuan dalam pers tidak berhenti sampai di situ. Kendati ruang gerak dan pendidikan perempuan masa penjajahan masih sangat minim, cita-cita menyuarkan kepentingan perempuan dan pengabdian pada bangsa masih tetap bertahan. Di kala mayoritas kaum perempuan dari semua kalangan di tanah Melayu buta huruf, hadirilah seorang tokoh pendidik sekaligus jurnalis perempuan Indonesia, Roehana Koeddoes. Memiliki nama asli Siti Roehana, ia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kotagadang, Sumatra Barat. Roehana merupakan putri dari seorang jaksa sekaligus juru tulis Hindia Belanda, Mohammad Rasjad Maharaja Soetan (cari kutipan). Kemampuannya dalam membaca dan menulis literatur tidak ia dapatkan melalui pendidikan di sekolah, melainkan secara otodidak karena gemar membaca buku di perpustakaan milik ayahnya serta dibantu oleh tetangga di Alahan Panjang (Kusumastuti P. dkk., 2020).

Saat menginjak usia 8 tahun, Roehana pun mulai membantu orang-orang di sekitarnya untuk belajar membaca dan menulis. Ketekunannya akan pengetahuan membuat Roehana meresmikan karier di bidang pendidikan pada tanggal 11 Februari 1911 dengan berhasil mendirikan sekolah khusus perempuan pertama di Indonesia, yang diberi nama Sekolah Kerajinan Amai Setia. Setelah itu, Roehana memperluas dedikasinya terhadap kaum perempuan dengan merintis surat kabar *Soenting Melajoe*. Sebagai surat kabar Indonesia pertama yang diprakarsai oleh perempuan, redaksi *Soenting Melajoe* dipimpin langsung oleh Roehana dan disokong oleh Ratna Juita sebagai redaktur pelaksana. Sepanjang kariernya, Roehana terus menulis artikel yang mendorong perempuan untuk mendapatkan keterampilan dan pendidikan, membela kesetaraan, dan melawan kolonialisme melalui tulisan-tulisan politiknya (Kusumastuti P. dkk., 2020).

Di masa yang sama dengan berdirinya *Soenting Melajoe*, terdapat sebuah surat kabar perempuan lain yang lahir di kota Brebes, yakni *Wanita Swara*. Surat kabar ini dinyatakan sebagai media yang diterbitkan oleh perkumpulan Boedi Oetomo cabang Pacitan. Berkat *Wanita Swara*, masyarakat bisa mengenal sosok Siti Soendari. Saat Siti Soendari menjabat sebagai pemimpin redaksi, ia sering kali mendapatkan surat dari para perempuan yang ditujukan agar *Wanita Swara* bisa memuat tulisan curahan hati perempuan mengenai mudahnya suami menceraikan istrinya dan kebiasaan suami yang selalu

ingin poligami (beristri lebih dari satu orang), serta pentingnya kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Banyaknya permintaan tersebut membuat Soendari tidak bisa memuat semuanya ke dalam surat kabar, tetapi pada akhirnya ia tulis sebagai laporan-laporan kepada Komisi Kemakmuran yang menjadi sebuah usulan agar kaum perempuan tidak lagi dipermainkan oleh kaum laki-laki pada ranah pernikahan. Sama seperti surat kabar perempuan lainnya, *Wanita Swara* juga ingin mendorong kaum perempuan agar bisa membaca dan menulis. Namun kenyataannya, di balik minimnya keinginan perempuan untuk bersekolah, terdapat alasan utama yang disebabkan oleh pelabelan patriarki yang telah memupuk di masyarakat pada masa itu (Kusumastuti P. dkk., 2020).

Berbicara soal Boedi Oetomo, organisasi ini sangat berperan penting dalam menginspirasi dan membantu pertumbuhan banyak organisasi perjuangan di Indonesia, salah satunya *Poetri Mardika*. *Poetri Mardika* adalah organisasi perempuan pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1912. *Poetri Mardika* pun turut mengembangkan media surat kabar bertajuk sama dengan nama mereka, yaitu *Poetri Mardika* (Serikat Penerbit Surat kabar, 1971). Surat kabar yang terbit pada tahun 1915 ini memperjuangkan emansipasi perempuan dengan memberikan sumbangsih pada pendidikan kaum perempuan. *Poetri Mardika* menghadirkan surat kabar agar bisa menjadi media pendidikan dan pengajaran bagi perempuan. Artikel-artikel yang dituangkan dalam

surat kabar pun merupakan buah-buah gagasan setiap anggota atas pikiran, ilmu, bahkan kegelisahan yang dialami secara pribadi (Yanti, 2020). Menurut Sadikoen (1915; dalam Yanti (2020)), hal itu dilakukan agar seluruh anggota bisa menyampaikan isi hati maupun pemikiran mereka untuk selanjutnya dirundingkan dan diupayakan solusinya.

Setelah masa kolonial, kiprah perempuan dalam pers berlanjut melalui sosok seperti Ani Idrus, yang mendirikan harian Waspada pada 11 Januari 1947 bersama suaminya, H. Mohamad Said. Ani memulai karier jurnalistik sejak 1930-an dengan menulis di Panji Pustaka dan majalah Seruan Kita (1938). Kiprahnya pascakemerdekaan memperlihatkan bahwa perempuan mampu menjadi penulis, editor, sekaligus pemilik media. Ia juga mendirikan majalah Dunia Wanita, menjadikannya salah satu pelopor media perempuan di Indonesia (Tirto.id, 2019).

Tokoh lain yang patut dicatat adalah Herawati Diah, perempuan Indonesia pertama yang lulus dari Barnard College, Amerika Serikat (1941). Ia mendirikan media berbahasa Inggris Indonesian Observer pada tahun 1955, yang menjadi salah satu media penting pascakolonial karena menjangkau khalayak internasional. Herawati Diah dikenal vokal menyuarakan isu nasionalisme, pendidikan, dan kesetaraan, serta menjadi inspirasi bagi generasi jurnalis perempuan setelahnya (Kompas.id, 2024).

Memasuki era Reformasi dan kontemporer, perempuan semakin aktif dalam dunia pers, baik di media arus utama maupun media digital. Banyak jurnalis perempuan kini menduduki posisi penting sebagai pemimpin redaksi, pembawa acara, hingga pendiri media. Kehadiran tokoh seperti Najwa Shihab melalui Narasi memperlihatkan bagaimana media digital dapat digunakan untuk menyuarakan isu demokrasi, hak-hak masyarakat, dan kesetaraan gender. Fenomena ini menegaskan bahwa perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai kontributor, tetapi juga sebagai aktor utama dalam membentuk arah perkembangan pers Indonesia modern.

2.2.2. Realitas Perjalanan Karier Jurnalis Perempuan

Luviana Aryanti, satu dari sekian jurnalis perempuan yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari perusahaan media selaku institusi kerja. Luviana telah bekerja lebih dari satu dekade di Metro TV (Tempo, 2013). Sayangnya perusahaan media televisi milik Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, tersebut melakukan pembebasan kepada Luviana lantaran mengkritisi kebijakan perusahaan dan menuntut beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh Metro TV kepada pekerjanya. Sejumlah hal yang menjadi fokus Luviana di antaranya, perbaikan kesejahteraan dan hak karyawan, rencana pembentukan serikat pekerja, mendorong perbaikan sistem evaluasi kerja agar lebih objektif, memperjuangkan pentingnya produksi program siaran yang peka terhadap isu gender dan hak asasi manusia

(HAM), dan meminta agar redaksi tidak terlibat atau campur tangan untuk memenuhi kepentingan politik semata (KBR, 2013; Puan Indonesia, 2024). Akan tetapi, sikap Luviana malah dinilai Metro TV sebagai upaya untuk mengubah sistem otoritas perusahaan, mempersuasi kawan-kawan pekerja agar mempertanyakan kembali kesejahteraan mereka, dan melakukan pencemaran nama baik Metro TV karena pernah menceritakan pengalamannya ke pihak lain (AJI Surabaya, 2012).

Menurut AJI Surabaya (2012), Luviana diminta mundur dari pekerjaannya tanpa alasan pada tanggal 31 Januari 2012. Kelanjutan kronologi yang dilansir oleh Tempo (2013), Luviana berkesempatan bertemu dengan Surya Paloh secara langsung pada tanggal 5 Juni 2012. Melalui pertemuan tersebut, Luviana telah dijanjikan akan dipekerjakan kembali ke Metro TV oleh Surya Paloh. Namun kenyataannya, Luviana justru mendapatkan surat pemecatan alias Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak pada tanggal 27 Juni 2012. Hingga per tanggal 1 Juli 2012, Luviana sudah tidak menerima gaji sepeser pun dari Metro TV. Padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Indonesia, 2003), pihak yang memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja atau berakhirnya hubungan kerja kecuali karena ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diwajibkan memberikan kompensasi kepada pihak lainnya senilai upah pekerja

hingga jangka waktu perjanjian tersebut usai, begitu pun yang seyogianya diberikan Metro TV kepada Luviana.

Setelah melalui kondisi tersebut, Luviana mulai memasuki babak baru dalam kariernya. Berangkat dari kepedulian Luviana terhadap kaum perempuan dan minoritas, ia kemudian menginisiasi penerbitan media Konde.co bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2016. Menurut penuturan Luviana dalam artikel Puan Indonesia (2024), lahirnya Konde.co tidak dapat dilepaskan dari situasi industri media di Indonesia yang didominasi oleh segelintir individu sehingga pola kepemilikan yang terpusat itu kerap menimbulkan pelbagai kepentingan, terutama terkait aspek ekonomi dan politik. Kondisi tersebut membatasi keberagaman perspektif dan mempersempit ruang bagi isu-isu yang menyangkut kelompok rentan. Oleh karena itu, kehadiran Konde.co merupakan perwujudan ruang publik yang dikelola berdasarkan kesadaran kritis dari perspektif perempuan dan minoritas yang kerap luput dari sorotan media arus utama.

Karya-karya inspiratifnya pun banyak yang dilandaskan pada kepedulian terhadap kelompok rentan, terutama perempuan. Luviana menjadi sutradara pada film *More Than Work* yang menggambarkan kondisi kekerasan seksual, sensasionalisme tubuh, serta kebijakan yang menjerat perempuan pekerja media (Kompas.id, 2024). Luviana juga menjadi kontributor pada riset AJI yang bertajuk “Jejak Jurnalis

Perempuan”, yang mengungkapkan seperti apa kondisi empiris yang dijalani oleh perempuan pekerja media.

Kisah Luviana tidak berdiri sendiri, secara struktural, jurnalis perempuan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius yang berkaitan dengan kekerasan dan diskriminasi.

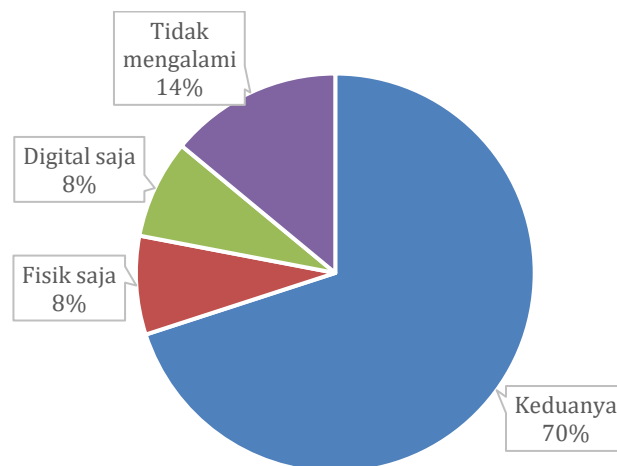


Diagram 2.1, Perbandingan jurnalis yang mengalami kekerasan di ranah digital dan fisik.

Sumber: PR2Media (2021)

Menurut data dari PR2Media (2021), hasil survei terhadap 1.256 jurnalis perempuan menunjukkan bahwa 86% mengaku pernah mengalami kekerasan baik secara fisik maupun digital sepanjang karier jurnalistik mereka. Dengan rincian, 70% responden mengalami keduanya (kekerasan fisik dan digital), 8% responden hanya mengalami kekerasan fisik, dan 8% responden hanya mengalami kekerasan digital.

Di sisi lain, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2024, di mana kekerasan

fisik menjadi yang paling sering terjadi (20 kasus), termasuk juga kasus femisida dan ancaman lainnya yang langsung menasar jurnalis perempuan (AJI Indonesia, 2024). Selama beberapa tahun terakhir, ancaman terhadap jurnalis perempuan semakin nyata dan mengkhawatirkan, misalnya kasus teror yang menimpa jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, yang menerima “kiriman” kepala babi dan tikus terpotong sebagai bentuk intimidasi politik. Ia juga menjadi korban doxing dan kekerasan digital yang menimpa anggota keluarganya menjadi simbol seriusnya ancaman terhadap perempuan jurnalis di Indonesia saat ini (The Guardian, 2025).

Perjalanan karier jurnalis perempuan mencerminkan realitas yang belum sepenuhnya ideal. Selain menghadapi aksi represif saat memperjuangkan keadilan dan kebebasan, perempuan juga berisiko tinggi mengalami berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, baik fisik maupun digital. Data dari AJI dan Komnas Perempuan mempertegas bahwa perlindungan, regulasi, dan solidaritas kolektif sangat dibutuhkan agar jurnalis perempuan dapat bekerja dengan aman, adil, dan setara